

Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan

Telepon : 082335621855

Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id

Nomor : 2/PM.00.02/K.JI-01/01/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Imbauan**

Bangkalan, 12 Januari 2026

Yth, **Ketua DPD/DPC Partai Politik**
Kabupaten Bangkalan (Terlampir)

di –

Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 685 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemuktahiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. Imbauan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangkalan pada Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Semester II Tahun 2025 melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), terdapat hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah menyampaikan surat secara tertulis kepada seluruh Ketua DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Bangkalan dengan nomor 16/PM.00.02/K.JI-01/06/2025, tertanggal 26 Juni 2025. Surat tersebut perihal imbauan agar Partai Politik melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui SIPOL;
2. Bahwa hingga batas akhir yang telah ditentukan, yaitu 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember 2025 Partai Politik (*terlampir*) **tidak melakukan** Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan;
3. Bahwa Partai Politik (*terlampir*) **tidak melaksanakan** ketentuan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 685 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik yaitu:

"Partai Politik peserta Pemilu menyampaikan dokumen hasil pemutakhiran kepada KPU melalui Sipol dalam 2 (dua) semester yaitu, Semester I disampaikan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni dan Semester II disampaikan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember".

Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangkalan **mengimbau** kepada Ketua DPC/DPD Partai Politik Kabupaten Bangkalan agar melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan,



Ahmad Mustain Saleh, S.E., M.M

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebagai laporan;
2. KPU Kabupaten Bangkalan
3. Bakesbangpol Bangkalan
4. Arsip

**DAFTAR PARTAI POLITIK KABUPATEN BANGKALAN YANG TIDAK MELAKUKAN
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN**

NO	PARTAI POLITIK
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P);
2	Partai Golongan Karya (GOLKAR);
3	Partai Buruh;
4	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN);
5	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);
6	Partai Amanat Nasional (PAN);
7	Partai Bulan Bintang (PBB);
8	Partai Persatuan Pembangunan (PPP);

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan,



Ahmad Mustain Saleh, S.E., M.M